

## IMPLEMENTASI FILSAFAT ILMU PERTAHANAN DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Robbyanandri Pratama<sup>1</sup>, Nila Aulia Khairunnisa<sup>2</sup>

Prodi Administrasi Pertahanan Akademi Militer Magelang<sup>1</sup>, Damai dan Resolusi  
Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>2</sup>  
Robbyanandripratama@gmail.com<sup>1</sup>, nilaauliak@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Implementasi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam kebijakan dan penyelenggaraan pertahanan negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Melalui pendekatan filosofis yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi, artikel ini menjelaskan pentingnya penerapan filsafat dalam memahami dan mengembangkan Ilmu Pertahanan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, yang membahas peran Ilmu Pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer, serta penerapannya dalam kebijakan pertahanan negara seperti Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Temuan utama menunjukkan bahwa Filsafat Ilmu Pertahanan berkontribusi dalam peningkatan kesadaran bela negara dan partisipasi warga negara. Kesimpulannya, filsafat ini berperan penting dalam membentuk kebijakan pertahanan yang holistik dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.

**Kata kunci:** Filsafat, Ilmu Pertahanan, Kebijakan, Bela Negara, Sishankamrata.

### *The Implementation Of The Philosophy Of Defense Science In Defense Policy And National Defense Management.*

#### Abstract

The implementation of the Philosophy of Defense Science in defense policy and national defense administration, aiming to enhance the nation's defense capabilities. Through a philosophical approach encompassing ontology, epistemology, and axiology, the article explains the importance of applying philosophy to understand and develop Defense Science. The method used is a literature review, which examines the role of Defense Science in addressing both military and non-military threats, as well as its application in national defense policies such as the Total People's Defense System (Sishankamrata). The key findings show that the Philosophy of Defense Science contributes to increasing awareness of national defense and citizen participation. In conclusion, this philosophy plays a crucial role in shaping holistic and participatory defense policies, involving all elements of the nation.

**Keywords:** Philosophy, Defense Science, Policy, National Defense, Sishankamrata.

## PENDAHULUAN

Filsafat ilmu telah lama menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pertahanan yang merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu pertahanan berfokus pada kajian mendalam tentang konsep-konsep dasar pertahanan negara, termasuk bagaimana suatu negara dapat melindungi dirinya dari ancaman internal dan eksternal secara efektif. Dalam perkembangannya, ilmu pertahanan mencakup berbagai aspek, baik dari segi militer, politik, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan. Ini mencerminkan kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh negara dalam era globalisasi, di mana tantangan tidak lagi terbatas pada ancaman fisik berupa serangan militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer seperti ancaman ekonomi, siber, dan ideologi. Filsafat ilmu pertahanan berperan penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang mampu merespons ancaman-ancaman tersebut secara komprehensif dan adaptif.

Salah satu elemen mendasar dalam filsafat ilmu pertahanan adalah refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kebijakan pertahanan suatu negara. Filsafat berperan sebagai panduan untuk mengevaluasi setiap tindakan dan kebijakan, memastikan bahwa pendekatan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pertahanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum harus tercermin dalam setiap kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap filsafat ilmu



pertahanan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pertahanan yang tidak hanya efektif dalam menghadapi ancaman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Sebagai disiplin ilmu yang berkembang, filsafat ilmu pertahanan juga mengajak kita untuk merenungkan hakikat ancaman yang dihadapi oleh suatu negara. Pada dasarnya, ancaman terhadap negara tidak selalu bersifat militer. Dalam era modern, ancaman semakin beragam dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ancaman ekonomi, serangan siber, krisis sosial, hingga perubahan iklim. Pemahaman tentang ancaman yang lebih luas ini mengharuskan adanya kebijakan pertahanan yang lebih holistik, di mana negara tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan militer, tetapi juga ancaman non-militer yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional.

Filsafat ilmu pertahanan juga menekankan pentingnya peran intelektual dalam mengembangkan strategi pertahanan yang berkelanjutan. Intelektual bela negara memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara teori dan praktik, mengembangkan strategi yang tidak hanya fokus pada pertahanan militer, tetapi juga pada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang merupakan bagian integral dari kekuatan pertahanan negara. Oleh karena itu, implementasi filsafat ilmu pertahanan dalam kebijakan pertahanan harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta tantangan global yang terus berkembang.

Lebih lanjut, filsafat ilmu pertahanan membawa kita pada pemikiran kritis mengenai isu-isu etika dan moral yang muncul dalam kebijakan pertahanan. Misalnya, penggunaan kekuatan militer untuk menjaga keamanan negara sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam hal ini, filsafat ilmu pertahanan mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan pertahanan dapat dilakukan dengan cara yang tetap menghormati hak-hak individu dan menjaga martabat kemanusiaan. Hal ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi di mana hak asasi manusia menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh suatu negara harus tidak hanya fokus pada efektivitas strategi, tetapi juga pada dampak sosial dan kemanusiaan dari tindakan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari peran Filsafat sebagai dasar dari penemuannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perkembangan dari ilmu pengetahuan tidak pernah mencapai titik yang sempurna karena memang tidak ada jawaban yang sempurna ditemukan oleh manusia. Terkait hal ini, disadarilah bahwa dibutuhkan sesuatu yang mendasar serta tidak dapat ditawar, yaitu Filsafat. Pada prinsip keilmuan, Filsafat ilmu merupakan suatu refleksi yang radikal, fundalis, serta tersistem.

Untuk menuju perubahan, manusia akan menemukan masalah yang harus dipecahkan dan diatasi. Masalah dalam kehidupan manusia akan dijawab oleh ilmu. Akan tetapi, masalah kehidupan tersebut sangatlah kompleks dan tidak semua dapat dijawab oleh ilmu, sehingga Filsafat akan menjadi tumpuan dalam menjawab masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu karena secara historis, Filsafat merupakan induk dari ilmu. Filsafat memiliki sifat ekstensial atau berhubungan erat dengan kehidupan. Filsafat akan menjelaskan atau menjawab permasalahan secara substansial atau radikal. Sementara itu, ilmu terus mengalami perkembangan dengan semakin terspesifik dan mandiri. Perkembangan ilmu pada prosesnya akan berada pada batas-batas wilayahnya dengan terus dikritisi. Proses inilah yang pada dasarnya merupakan bidang dari kajian Filsafat Ilmu.

Salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terspesifik dan mandiri adalah ditemukannya Ilmu Pertahanan sebagai suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional negara guna dijadikan sebagai kekuatan nasional. Suatu bangsa dituntut untuk mempelajari Ilmu Pertahanan karena akan bermanfaat pada setiap aspek kehidupan masyarakat, di dalamnya termasuk moral serta moril, politik, ideologi, geografi, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, serta keamanan dan pertahanan itu sendiri.

Ilmu pertahanan hadir dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara. Objek dari Ilmu Pertahanan adalah perilaku negara dalam menghadapi ancaman dengan dapat memilah antara ancaman militer, ancaman non-militer, bahkan ancaman hibrida. Penggabungan Filsafat dengan Ilmu Pertahanan sehingga menjadi Filsafat Ilmu Pertahanan menjadi sangat penting untuk dipahami serta diteliti oleh para intelektual bela negara. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana peran Filsafat Ilmu Pertahanan untuk meningkatkan kemampuan dasar pertahanan negara.

Implementasi dari Filsafat Ilmu Pertahanan dapat ditemukan pada diri intelektual bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, serta perilaku dari warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta akan tanah air. Namun, pengertian bela negara yang dipahami oleh masyarakat umum ialah mengangkat senjata dan pergi berperang. Padahal, penerapan dari bela negara tidak selalu tentang hal tersebut karena upaya bela negara bukan hanya menjadi tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia), tapi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban akan bela negara ini berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Literatur. Kajian Literatur atau kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *contact review*, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan.

Sedangkan menurut Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012), mengemukakan batasan kajian pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Kajian ini sangat berguna bagi peneliti untuk memberikan gambaran masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti, dan selanjutnya berguna untuk bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian. Disamping itu, kajian pustaka atau literatur dapat membimbing peneliti untuk menyusun suatu hipotesis penelitian yang akan dikerjakan.

Kajian pustaka merupakan salah satu cara atau sarana untuk menunjukkan pengetahuan penulis tentang suatu bidang kajian tertentu, yang mencakup kosakata, metode, dan asal-usulnya. Disamping itu sebuah kajian pustaka memberikan informasi kepada para pembaca tentang peneliti dan kelompok peneliti yang memiliki pengaruh dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam bidang pembelajaran, evaluasi, teknologi pembelajaran, pembelajaran ilmu pengetahuan, alam atau sains, dan seterusnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Filsafat Ilmu Pertahanan dalam Meningkatkan Kemampuan Dasar Bela Negara.**

Filsafat Ilmu menjadi kajian filosofis akan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dapat dikatakan, upaya dalam pengkajian dan pendalaman Ilmu Pengetahuan atau Sains adalah menggunakan Filsafat Ilmu, baik secara substansi, pemerolehannya, maupun manfaatnya dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pengkajian dan pendalaman tersebut, tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang mencakup bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Acuan pokok dari Filsafat Ilmu, menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terspesifik telah melahirkan berbagai disiplin ilmu, salah satunya Ilmu Pertahanan. Ilmu pertahanan hadir dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara. Ditegaskan juga oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Konferensi Pers setelah kegiatan Rapat Pimpinan Kemhan di Tahun 2020, menyatakan bahwa Pertahanan merupakan investasi negara yang perlu untuk ditingkatkan secara terus-menerus.

Diskursus dari Ilmu pertahanan adalah terkait ancaman dan keamanan negara. Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, dalam karyanya “Tentang Ilmu Pertahanan” menyatakan bahwa Pertahanan adalah ilmu yang ada karena adanya ancaman sehingga ilmu pertahanan menjadi ilmu terapan, yaitu bagaimana menerapkan ilmu dalam suatu peperangan. Sebagai ilmu interdisipliner atau multi-disipliner, Ilmu Pertahanan merupakan gabungan dari ilmu-ilmu terapan lainnya. Secara alami asal dari ilmu pertahanan adalah strategi, yaitu penerapan dari berbagai ilmu serta seni untuk mengerahkan alat yang dalam hal ini pasukan/kekuatan bersenjata dengan metode tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman.

Letjen TNI (Purn.) Syarifuddin Tippe juga merangkan, secara teoritis Ilmu Pertahanan berada pada posisi teori dasar (*grand theory*) atas berbagai disiplin ilmu yang sejalan atau relevan dengan problem yang bersifat kompleks serta problematik untuk dicarikan solusinya. Ilmu pertahanan mempunyai *output* yang disebut dengan kesadaran bela negara, yaitu terdiri atas rela berkorban, pantang menyerah, serta tanpa pamrih. Sedangkan untuk *outcome*-nya berupa timbulnya daya tangkal atau

*different effect*. Ilmu Pertahanan mempelajari mengapa dan bagaimana eksistensi suatu negara dapat dipertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari jenis-jenis ancaman baik dalam maupun luar negeri.

Objek dari Ilmu Pertahanan adalah perilaku negara dalam menghadapi ancaman dengan dapat memilah antara ancaman militer, ancaman non-militer, bahkan ancaman hibrida. Dengan begitu, dapat ditentukan bagaimana strategi pertahanannya, apakah dengan cara pertahanan militer atau pertahanan nir-militer. Pertahanan dalam menghadapi ancaman militer maka strategi pertahanan negara dapat menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan diperkuat oleh komponen cadangan serta komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, dalam strategi pertahanannya negara dapat menempatkan Kementerian / Lembaga (K/L) dari luar bidang pertahanan guna menjadi unsur utama dengan dibantu oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Kemudian, untuk menghadapi ancaman hibrida, Indonesia dapat menerapkan pertahanan militer yang didukung oleh pertahanan nir-militer dengan diformasikan ke dalam komponen pendukung sesuai dengan tingkat serta eskalasi yang muncul.

Dalam membahas Ilmu Pertahanan, Filsafat Ilmu menjadi kunci dasar dari perkembangan keilmuan ini. Filsafat Ilmu Pertahanan menjadi penting untuk diperdalam demi meningkatkan kemampuan dasar pertahanan negara. Bela negara sebagai bentuk dari tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air. Berdasarkan perkembangan peradaban manusia, sistem perang modern tidak hanya perang yang berbentuk fisik, tetapi juga perang ideologi, pemikiran, dan budaya, sehingga dasar filosofi yang berkaitan dengan ilmu pertahanan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dari pengembangan jiwa bela negara. Hakikat dari pertahanan adalah partisipasi seluruh warga negara sebagai bentuk dari ekspresi kewajiban dan hak. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 30 (1) Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) yang menegaskan bahwa upaya pertahanan negara dilakukan dengan cara sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya.

Kesadaran bela negara juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada era di mana ancaman dapat datang dari luar yang berbentuk ancaman bersenjata, tetapi juga dari dalam terkait masalah-masalah identitas dan budaya. Perlu adanya gagasan terhadap keamanan individu sebagai bentuk dari keamanan kolektif karena hal ini dianggap lebih menantang pada saat ini dari pada konsep konservatif seperti keamanan negara.

## **2. Implementasi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam Kebijakan dan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.**

Dasar pokok ilmu filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi landasan dalam menghasilkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan dalam pertahanan negara. Dengan adanya dasar ini, untuk kedepannya akan memudahkan lahirnya program-program pemerintah guna meningkatkan kesadaran bela negara.

Implementasi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam kebijakan dan penyelenggaraan pertahanan negara adalah program bela negara, di mana juga sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Menurut Rahman (2015), Filsafat Ilmu Pertahanan juga sangat terkait dengan etika dan moral dan merupakan perwujudan dari amanat konstitusi. Menyadari akan kompleksitas tantangan serta ancaman yang dihadapi negara saat ini, telah diperparah dengan persaingan serta kecakapan dalam mengelola SDA Yang ada. Ancaman dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Berbagai ancaman ini dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Salah satu bentuk dari implementasi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam kebijakan dan penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu meningkatnya keterampilan intelektual melalui pendidikan bela negara. Keterampilan intelektual ini dapat bermanfaat terutama dalam mengolah berbagai informasi yang diperlukan guna kehidupan berbangsa dan bernegara.

Filsafat Ilmu Pertahanan dan konsep bela negara, secara aksiologis dapat memberikan manfaat terhadap eksistensi negara dalam mewujudkan kedaulatan dengan cara memaparkan konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai wujud implementasinya dalam kebijakan dan

penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur-unsur yang ada pada konsep Sishankamrata berguna untuk menghadapi ancaman baik aktual maupun potensial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan dari pengetahuan kesadaran bela negara yang dapat dilaksanakan di berbagai tahapan atau jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara dapat mewujudkan upaya pertahanan negara serta memaknai berbagai kandungan nilai bela negara dalam menegakkan kedaulatan negara.

## SIMPULAN

Filsafat Ilmu Pertahanan merupakan elemen mendasar dalam pengembangan kebijakan dan strategi pertahanan negara. Melalui pendekatan filosofis yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, Filsafat Ilmu Pertahanan tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga solusi praktis terhadap tantangan pertahanan yang kompleks. Implementasi filsafat ini mendorong kesadaran bela negara yang mencakup sikap rela berkorban, pantang menyerah, dan tanpa pamrih dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

Partisipasi aktif warga negara sebagai bagian dari sistem pertahanan menjadi hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi, di mana pertahanan negara tidak hanya tanggung jawab TNI tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Program bela negara, yang berlandaskan Filsafat Ilmu Pertahanan, merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kesiapan nasional menghadapi ancaman militer maupun non-militer, termasuk ancaman hibrida.

Filsafat Ilmu Pertahanan juga berperan dalam memperkuat keterampilan intelektual melalui pendidikan bela negara, membantu individu memahami dan merespons tantangan pertahanan yang muncul dalam bentuk ideologi, pemikiran, dan budaya. Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diusung filsafat ini memberikan pendekatan holistik dalam menyatukan seluruh komponen bangsa, baik militer maupun non-militer, untuk menghadapi ancaman terhadap negara.

Secara keseluruhan, filsafat ini berkontribusi pada upaya mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara, serta mendorong penguatan pengetahuan dan kesadaran bela negara di semua tingkatan pendidikan, sebagai langkah penting dalam menjaga pertahanan nasional.

Pada era di mana ancaman dapat datang dari luar yang berbentuk ancaman bersenjata, tetapi juga dari dalam terkait masalah-masalah identitas dan budaya. Perlu adanya gagasan terhadap keamanan individu sebagai bentuk dari keamanan kolektif karena hal ini dianggap lebih menantang pada saat ini dari pada konsep konservatif seperti keamanan negara. Dibutuhkan penguatan dari pengetahuan kesadaran bela negara yang dapat dilaksanakan di berbagai tahapan atau jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara dapat mewujudkan upaya pertahanan negara serta memaknai berbagai kandungan nilai bela negara dalam menegakkan kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manurung, Yanto, dkk. (2022). Martabat Bangsa dan Negara di Atas Segala-galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara. *Jurnal Civic Hukum*. 7(1): 21-30.
- Mariyah, Siti, dkk. (2021). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 13(2): 242-246.
- Matondang, Erlinda. (2015). Kurikulum Bela Negara di Tingkat Pendidikan Tinggi: Porspektif Ketimpangan dalam Sistem Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahan*. 5(3): 21-41.
- Pangestu, Langgeng Gilang dan Hikmat Zakky Almubaroq. (2022). Filsafat Ilmu Pertahanan dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Dasar Bela Negara. *Jurnal Paris Langkis*. 2(2): 63-69.
- Rokhmah, Dewi. (2021). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. 7(2): 172-185.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tippe, Syarifuddin. (2016). Strategi Pertahanan Semesta: Memahami *Green and Blue Belt Security* dalam konsep Ekonomi Konstitusi di Kawasan Perbatasan. 1(2): 1-12.